

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENURUT PENGELUARAN

2014-2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MENURUT PENGELUARAN**

2014-2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MENURUT PENGELUARAN
2014 - 2018**

ISBN : 978-602-355-083-8
Nomor Publikasi : 13010.1905
Katalog : 9302020.1301
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 72 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Gambar Kulit/Cover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ilustrasi Kulit Kulit/Cover :

Muaro Sigapokna, Desa di Sigapokna, Kec. Siberut Barat

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dicetak Oleh :

CV. MULTI SARANA ABADI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MENURUT PENGELUARAN
2014 - 2018**

Anggota Tim Penyusun

Pengarah : Taufik Amnul Hayat, M.Si.

Editor : M. Aulia Rahman, S.ST.

Penulis : 1. Yanda Frimahatta, S.ST.
2. Iskandar Muda, S.Si.

Cover dan Infografis : Yanda Frimahatta, S.ST.

Pengolah Data : M. Aulia Rahman, S.ST

<https://mentawaikal.bps.go.id/>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Tuapejat, September 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Taufik Amnul Hayat, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
 BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	16
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	18
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	21
2.5 Perubahan Inventori (PI)	23
2.6 Ekspor Impor	26
 BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2014-2018	
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	38
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	43
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.2.5 Net Ekspor Antar Daerah	48
 BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2014-2018	
4.1 PDRB (Nominal)	53
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	54
4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	54
 BAB V. PENUTUP	59
 LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	32
Tabel 3.1.2 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	33
Tabel 3.1.3 Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	35
Tabel 3.1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	37
Tabel 3.1.5 Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014-2018	38
Tabel 3.2.1.1 Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018.....	40
Tabel 3.2.1.2 Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	41
Tabel 3.2.1.3 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018.....	42
Tabel 3.2.2.1 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	43
Tabel 3.2.3.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018.....	44
Tabel 3.2.4.1 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	47
Tabel 3.2.5.1.1 Perkembangan Ekspor Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	48
Tabel 3.2.5.2.1 Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	50
Tabel 4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	53
Tabel 4.2.1 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018.....	54
Tabel 4.3.1 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2018	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran dan Jumlah Penduduk, 2014-2018	32
Gambar 3.1.2 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	34
Gambar 3.1.3 Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018	34
Gambar 3.1.4 Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	36
Gambar 3.1.5 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018 63
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018 64
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018 65
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018 66
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018 67
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018 68
Lampiran 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014-2018 69
Lampiran 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018 70
Lampiran 9	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014-2018 71
Lampiran 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014-2018 72



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk : i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi;

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimasukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor Impor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, **PDRB Pengeluaran** juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik regional bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*Cultivated Biological Resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*Military Weapon Systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*Mineral Exploration and Evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*Computer Software and Databases/CSD*).CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*Entertainment, Literary or Artistic Originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga perekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

PENDAHULUAN

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



KOMPONEN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi
LNPR

Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

PMTB

Perubahan Inventori

Ekspor

Impor

BAB 2

**METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DAT**

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, PereInggapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings/OOD*); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer),
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri,
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain,
- Barang dan jasa yang dibeli langsung oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu :

- Pembelian langsung non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut,

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga,
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah,
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);

7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani RumahTangga (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga

- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan sebagainya

iv. Sumber Data

- i. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- ii. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- iii. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- iv. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

i Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan

aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- Data realisasi APBD Tahunan (Badan Keuangan Daerah)
- Data Realisasi APBN Tahunan (Kementerian Keuangan)
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

- Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan

dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

1. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- c. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- d. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- e. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- f. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS
- g. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- h. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- i. Dinas Pertanian
- j. Laporan realisasi APBD dari BKD (Badan Keuangan Daerah) dan realisasi APBN dari Kementerian Keuangan

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas

dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $PMTB \text{ atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $PMTB \text{ atas dasar harga Konstan (t)} = PMTB \text{ atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5 Perubahan Inventori

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
4. Data komoditas perkebunan, Dinas Pertanian
5. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
6. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
7. Data persediaan beras, Bulog; dan komoditi lainnya, berbagai sumber.
8. Badan Penanaman Modal Investasi Asing Dalam Negeri; www.bkpm.go.id
9. Survei khusus studi penyusunan perubahan inventori (SKSPPI), BPS

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}} \times$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 Ekspor-Import

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- Import dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

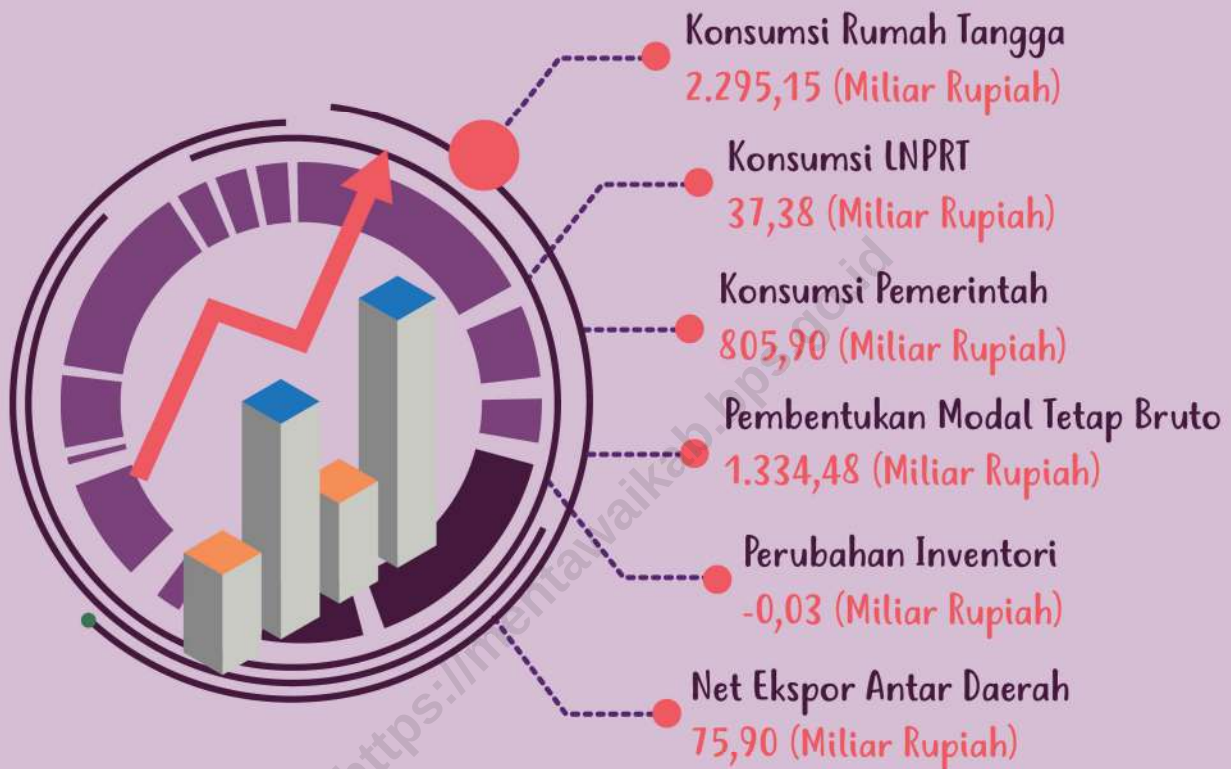
iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2018^{xx}
di Kabupaten Kepulauan Mentawai



^{xx}Angka Sangat Sementara

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014-2018

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai atas dasar harga Berlaku di tahun 2018 meningkat sebesar 7,53 persen, yakni dari 4.089,13 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 4.396,98 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka peningkatan nilai PDRB yakni dari 2.742,05 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 2.876,94 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 4,92 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2014 - 2018 yakni sebesar 5,57 persen; 5,20 persen; 5,02 persen; 5,13 persen; dan 4,92 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi & Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,72 persen di tahun 2018. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,24 persen.

Pada periode tahun 2014 - 2018 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 3.027,23 miliar Rupiah (2014); 3.395,69 miliar Rupiah (2015); 3.725,73 miliar Rupiah (2016); 4.089,13 miliar Rupiah (2017); dan 4.396,98 miliar Rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.1.1 berikut ini:

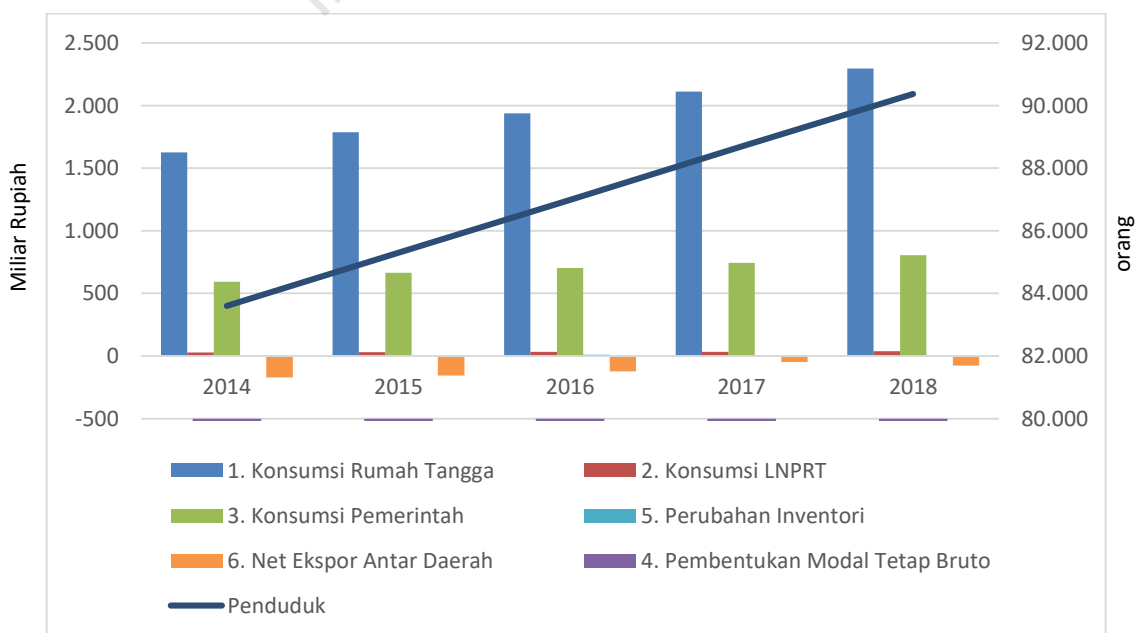
Tabel 3.1.1. PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014 - 2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.625,78	1.787,27	1.937,85	2.111,27	2.295,15
2. Konsumsi LNPRT	27,96	30,21	33,16	34,40	37,38
3. Konsumsi Pemerintah	593,81	665,00	702,77	743,40	805,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	955,68	1.069,16	1.164,01	1.247,03	1.334,48
5. Perubahan Inventori	-4,08	0,50	10,75	0,34	-0,03
6. Net Ekspor Antar Daerah	-171,93	-156,46	-122,80	-47,31	-75,90
Total PDRB	3.027,23	3.395,69	3.725,73	4.089,13	4.396,98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1.1. PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran dan Jumlah Penduduk, 2014 – 2018



* Angka Sementara

**** Angka Sangat Sementara**

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari Tabel 3.1.2 dan Gambar 3.1.2 berikut ini:

Tabel 3.1.2. PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rp), 2014-2018

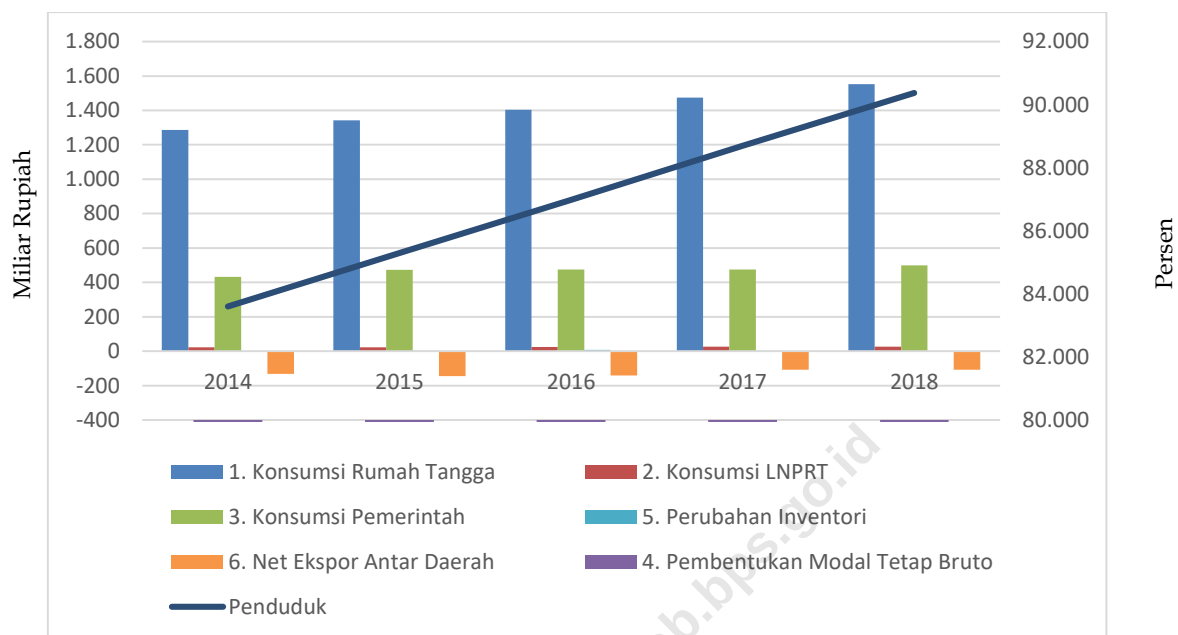
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.286,64	1.342,13	1.404,55	1.473,75	1.552,81
2. Konsumsi LNPRT	22,64	23,42	24,57	25,73	27,33
3. Konsumsi Pemerintah	432,13	473,74	474,33	475,59	498,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	755,87	788,17	838,28	874,33	905,62
5. Perubahan Inventori	-3,87	0,41	8,20	0,24	-0,02
6. Net Ekspor Antar Daerah	-132,67	-144,30	-141,81	-107,58	-107,14
Total PDRB	2.360,75	2.483,57	2.608,13	2.742,05	2.876,94

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3.1.2, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat, yakni sebesar 2.360,75 miliar Rupiah (2014); 2.483,57 miliar Rupiah (2015); 2.608,13 miliar Rupiah (2016); 2.742,05 miliar Rupiah (2017); dan 2.876,94 miliar Rupiah (2018).

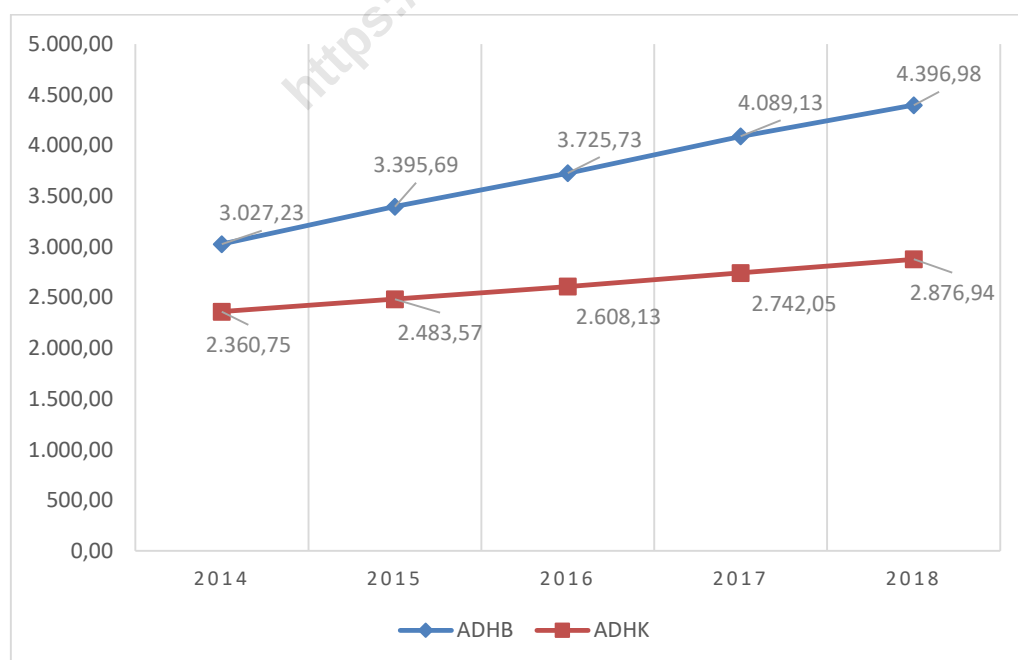
Gambar 3.1.2. PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1.3. Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014-2018



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Gambar 3.1.3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.1.3. Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2014 – 2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,71	52,63	52,01	51,63	52,20
2. Konsumsi LNPRT	0,92	0,89	0,89	0,84	0,85
3. Konsumsi Pemerintah	19,62	19,58	18,86	18,18	18,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,57	31,49	31,24	30,50	30,35
5. Perubahan Inventori	-0,13	0,01	0,29	0,01	0,00
6. Net Ekspor Antar Daerah	-5,68	-4,61	-3,30	-1,16	-1,73
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

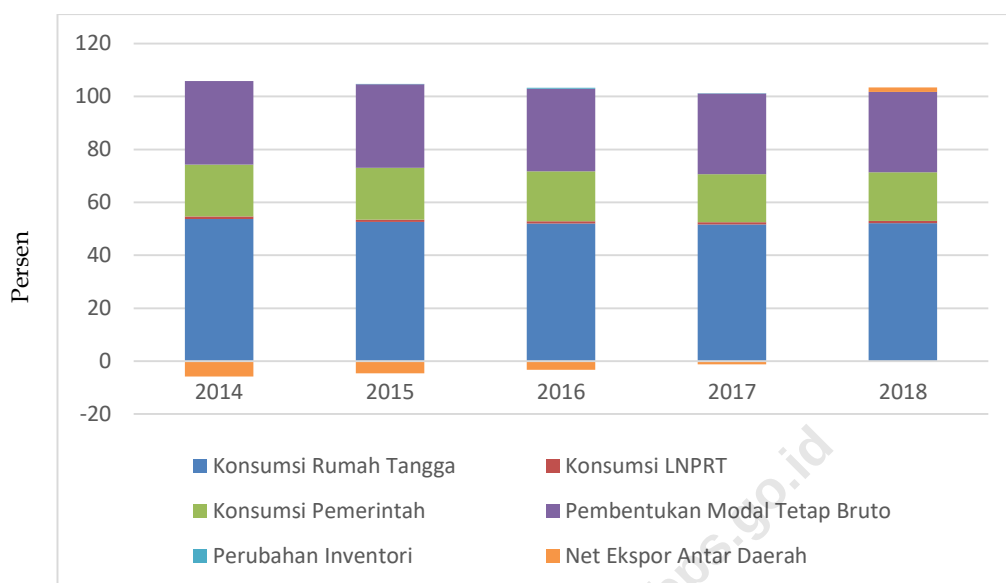
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa (Net Ekspor Antar Daerah).

Dari Tabel 3.1.3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 51 s.d 53 persen.

Gambar 3.1.4. Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 18 – 19 persen. Angka tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB. Pada periode 2014-2018 perdagangan antar daerah menunjukkan nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor (dalam kondisi “surplus” atau menguntungkan), terlihat pada nilai net ekspor antar daerah yang bernilai positif.

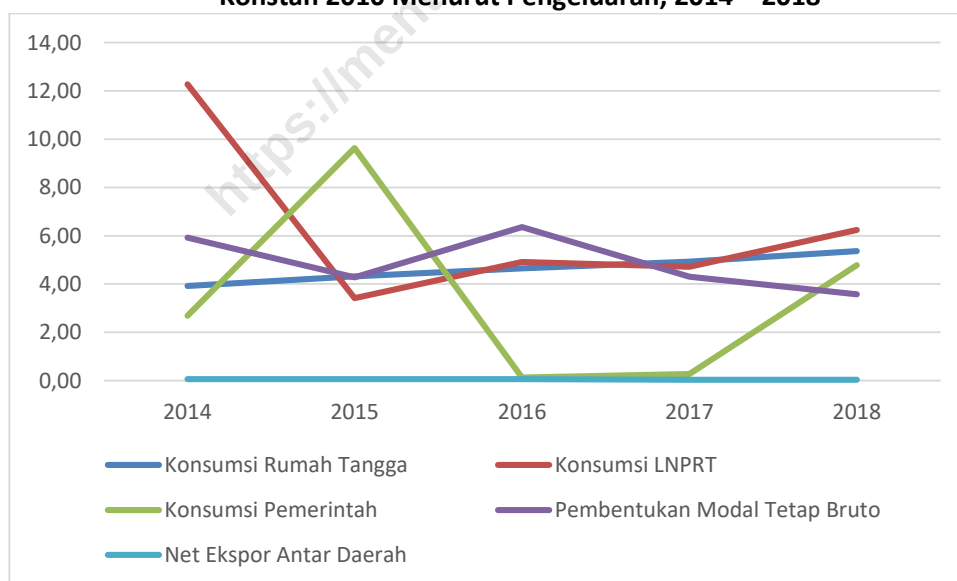
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pada tabel 3.1.4 dapat dilihat, selama periode tahun 2014 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap mampu tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,57 persen (2014); 5,20 persen (2015); 5,02 persen (2016); 5,13 persen (2017) dan di 2018 sebesar 4,92 persen. Sedangkan dari Gambar 3.1.5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 3.1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persentase), 2014 – 2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,92	4,31	4,65	4,93	5,36
2. Konsumsi LNPRT	12,28	3,42	4,92	4,71	6,24
3. Konsumsi Pemerintah	2,69	9,63	0,13	0,27	4,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,92	4,27	6,36	4,30	3,58
5. Perubahan Inventori	(84,93)	(110,71)	1.878,93	(97,08)	(108,06)
6. Net Ekspor Antar Daerah	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
Total PDRB	5,57	5,20	5,02	5,13	4,92

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1.5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor (net ekspor antar daerah). Dari Tabel 3.1.5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014 – 2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.1.5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	126,36	133,17	137,97	143,26	147,81
2. Konsumsi LNPRT	123,48	129,02	134,96	133,70	136,77
3. Konsumsi Pemerintah	137,42	140,37	148,16	156,31	161,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	126,43	135,65	138,86	142,63	147,36
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Net Ekspor Antar Daerah	129,59	108,42	86,60	43,98	70,84
6.a. Ekspor	124,38	123,91	129,54	137,05	136,05
6.b. Impor	124,67	122,99	127,18	133,46	133,56
Total PDRB	128,23	136,73	142,85	149,13	152,83

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada

⁶ Indeks Perkembangan

periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 2014 – 2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 – 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.2.1.1. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.625,78	1.787,27	1.937,85	2.111,27	2.295,15
b. ADHK 2010	1.286,64	1.342,13	1.404,55	1.473,75	1.552,81
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)					
	53,71	52,63	52,01	51,63	52,20
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga (Ribu Rp)					
a. ADHB	81.550,17	87.856,73	93.408,16	99.809,62	106.483,73
b. ADHK 2010	64.538,52	65.975,14	67.702,06	69.670,83	72.042,69
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	19.168,59	19.938,30	21.559,89	23.425,53	25.396,42
b. ADHK 2010	15.169,96	14.972,47	15.626,57	16.351,89	17.182,21
Pertumbuhan ²					
a. Total Konsumsi RT	3,92	4,31	4,65	4,93	5,36
a. per-RT	1,73	2,23	2,62	2,91	3,40
c. per-Kapita	0,28	-1,30	4,37	4,64	5,08
Jumlah RT	19.936	20.343	20.746	21.153	21.554
Jumlah Penduduk (orang)	84.815	89.640	89.882	90.127	90.373

Selama periode 2014 – 2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 53,71 persen (2014); 52,63 persen (2015); 52,01 persen (2016); 51,63 persen (2017); dan 52,20 persen (2018). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,71 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 51,63 persen. Penyebab rendahnya proporsi pengeluaran konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2017 karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan pencabutan subsidi kepada sebagian pelanggan listrik 900VA yang dinilai mampu. Kebijakan ini dinilai ikut menggerus pendapatan masyarakat dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga akan memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran

berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Keadaan ini memicu meningkatnya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2014 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 3,92 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 4,31 persen (2015); 4,65 persen (2016); 4,93 persen (2017); dan 5,36 persen (2018). Sementara itu rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 0,28 persen (2014); -1,30 persen (2015); 4,37 persen (2016); 4,64 persen (2017); dan 5,08 persen (2018).

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, atas dasar harga berlaku setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara rata-rata menghabiskan dana sekitar 81,55 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 87,85 juta Rupiah (2015); 93,40 juta Rupiah (2016); 99,81 juta Rupiah (2017); dan 106,48 juta Rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata pertumbuhan konsumsi per rumah tangga pada kisaran 1-3 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,40 persen. Struktur konsumsi rumah tangga selama periode 2014-2018, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1.2. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Persen), 2014—2018⁷

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	52,48	51,06	50,61	50,69	50,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,45	3,48	3,42	3,40	3,40
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,05	7,52	7,41	7,28	7,31
d. Kesehatan & Pendidikan	6,20	6,35	6,51	6,79	6,86
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	20,90	21,69	22,10	21,98	22,26
f. Hotel & Restoran	3,88	3,93	3,91	3,98	3,97
g. Lainnya	6,04	5,96	6,04	5,88	5,85
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit disajikan dalam Tabel 3.2.1.3, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selama kurun 2014-2018, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,39 persen.

Tabel 3.2.1.3. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Persen), 2014—2018⁸

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,44	4,62	4,09	3,40	4,21
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,23	3,27	2,67	2,80	3,88
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,88	3,47	2,70	5,46	3,82
d. Kesehatan & Pendidikan	8,12	8,98	6,51	4,59	2,51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,12	6,92	2,00	3,94	0,99
f. Hotel & Restoran	4,42	5,28	4,38	3,02	4,26
g. Lainnya	5,64	6,44	3,13	5,40	1,23
Total Konsumsi	5,22	5,39	3,61	3,83	3,17

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

**Tabel 3.2.2.1. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	27,96	30,21	33,16	34,40	37,38
b. ADHK 2010	22,64	23,42	24,57	25,73	27,33
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,92	0,89	0,89	0,84	0,85
Pertumbuhan (% ADHK)	12,28	3,42	4,92	4,71	6,24

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 konsumsi LNPRT sebesar 27,96 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya menjadi 30,21 miliar rupiah (2015); 33,16 miliar rupiah (2016); 34,40 miliar Rupiah (2017); dan 37,38 persen (2018). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 12,28 persen (2014); 3,42 persen (2015); 4,92 persen (2016); 4,71 persen (2017); dan 6,24 persen (2018). Capaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 12,28 persen, dikarenakan adanya persiapan lembaga-lembaga non profit, terutama partai politik menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden pada pertengahan tahun 2014.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan

jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.2.3.1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	593,81	665,00	702,77	743,40	805,90
b. ADHK 2010	432,13	473,74	474,33	475,59	498,34
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	19,62	19,58	18,86	18,18	18,33
Rata-rata Konsumsi Pemerintah per-Pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	229,71	249,63	289,44	300,97	337,06
b. ADHK 2010	167,17	177,83	195,36	192,55	208,42
Rata-rata Konsumsi Pemerintah per-Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	7,00	7,42	7,82	8,25	8,92
b. ADHK 2010	5,09	5,28	5,28	5,28	5,51
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,69	9,63	0,13	0,27	4,78
a. per-kapita	(0,91)	3,73	(0,14)	(0,01)	4,50
c. per-Pegawai Pemerintah	0,58	6,38	9,86	(1,44)	8,25
Jumlah Pegawai Pemerintah (orang)	2.585	2.664	2.428	2.470	2.391
Jumlah Penduduk (orang)	84.815	89.640	89.882	90.127	90.373

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 593,81 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 665,00 miliar rupiah (2015); 702,77 miliar rupiah (2016); 743,40 miliar Rupiah (2017); dan 805,90 miliar Rupiah (2018). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dari 19,62 persen di tahun 2014 hingga mencapai 18,33 persen di tahun 2018. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 18,18 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 19,62 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 7,00 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 7,42 juta rupiah (2015); 7,82 juta rupiah (2016); 8,25 juta rupiah (2017); dan mencapai 8,92 juta rupiah pada tahun 2018.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 5,09 juta rupiah (2014); 5,28 juta rupiah (2015); 5,28 juta rupiah (2016); 5,28 juta rupiah (2017); dan 5,51 juta rupiah (2018).

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah per-kapita juga berfluktuasi yakni sebesar -0,91 persen (2014), kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi

pemerintah per kapita yaitu 3,73 persen (2015); -0,14 persen (2016); -0,01 persen (2017); dan 4,50 persen (2018).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat di tahun 2014 – 2018 karena adanya kenaikan gaji pegawai. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 229,71 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 249,63 juta rupiah (2015); 289,44 juta rupiah (2016); 300,97 juta rupiah (2017); dan 337,06 juta rupiah (2018).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 9,86 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah trendnya selalu menunjukan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), meskipun tidak sejalan dengan trend jumlah pegawai pemerintah yang mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2014 s.d 2018 jumlah pegawai pemerintah pada masing-masing tahun adalah sebanyak 2.585 orang (2014); 2.664 orang (2015); 2.428 orang (2016); 2.470 orang (2017); dan 2.391 orang (2018). Penurunan yang terjadi di tahun 2018 disebabkan beralihnya status kepegawaian guru-guru/pegawai pada sekolah setingkat SMA dari pegawai Pemerintah Daerah menjadi pegawai Pemerintah Provinsi.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan fluktuasi baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

(*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 – 2018 berfluktuasi masing-masing 5,92 persen (2014); 4,27 persen (2015); 6,36 persen (2016); 4,30 persen (2017); dan 3,58 persen (2018). Tampak bahwa, pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2016.

**Tabel 3.2.4.1. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	955,68	1.069,16	1.164,01	1.247,03	1.334,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	755,87	788,17	838,28	874,33	905,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,57	31,49	31,24	30,50	30,35
Struktur PMTB ⁵					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	655,87	731,87	806,83	870,33	948,12
(%)	68,63	68,45	69,31	69,79	71,05
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	299,81	337,29	357,18	376,71	386,36
(%)	31,37	31,55	30,69	30,21	28,95
Total PMTB					
(Miliar Rp)	955,68	1.069,16	1.164,01	1.247,03	1.334,48
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁶ (%)					
a. Bangunan	4,81	5,24	7,71	5,64	4,81
b. Non Bangunan	8,39	2,19	3,37	1,21	0,62
Total PMTB	5,92	4,27	6,36	4,30	3,58

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.5. Net Ekspor Antar Daerah

3.2.5.1. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu Kabupaten/Kota lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 3.2.5.1.1. Perkembangan Ekspor Kabupaten Kepulauan Mentawai
2014—2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.750,91	2.835,47	3.156,63	3.682,66	3.669,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.211,74	2.288,30	2.436,74	2.687,15	2.697,47
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	90,87	83,50	84,73	90,06	83,46
Pertumbuhan (% ADHK)	9,18	3,46	6,49	10,28	0,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar 2.750,91 miliar rupiah menjadi 3.669,87 miliar rupiah pada tahun 2018. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuatif dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2.211,74 miliar rupiah (2014); 2.288,30 miliar rupiah (2015); 2.436,74 miliar rupiah (2016); 2.687,15 miliar rupiah (2017); dan 2.697,47 miliar rupiah (2018). Sementara itu, pada periode 2014 s.d 2018, proporsi dalam PDRB justru cenderung berfluktuatif dari 90,87 persen pada tahun 2014 menjadi 83,46 persen di tahun 2018.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2017 yang mencapai 10,28 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan

adanya peningkatan volume ekspor barang dan jasa. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 9,18 persen (2014); 3,46 persen (2015); 6,49 persen (2016); dan 0,38 persen (2018).

3.2.5.2 Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga, untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kepulauan Mentawai di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai berfluktuatif (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 s.d 2018. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 2.922,84 miliar rupiah, kemudian berfluktuatif di tahun 2015 menjadi 2.991,93 miliar rupiah, 3.279,44 miliar rupiah (2016), 3.729,97 miliar rupiah (2017) dan menjadi 3.745,77 miliar rupiah (2018). Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 96,55 persen; 88,11 persen (2015); 88,02 persen (2016); 91,22 persen (2017); dan 85,19 persen (2018).

**Tabel 3.2.5.2.1. Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Mentawai
2014—2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.922,84	2.991,93	3.279,44	3.729,97	3.745,77
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.344,41	2.432,61	2.578,54	2.794,73	2.804,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	96,55	88,11	88,02	91,22	85,19
Pertumbuhan (% ADHK)	8,71	3,76	6,00	8,38	0,35

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PERANAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku

Mencapai **4.396,98 Miliar Rupiah**

atau Sebesar **71,38%**



BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2014-2018**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	3.027,23	3.395,69	3.725,73	4.089,13	4.396,98
b. ADHK 2010	2.360,75	2.483,57	2.608,13	2.742,05	2.876,94
PDRB Per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	35.692,12	37.881,41	41.451,34	45.370,77	48.653,67
b. ADHK 2010	27.834,06	27.706,06	29.017,23	30.424,29	31.834,12
Pertumbuhan PDRB Per-Kapita					
ADHK 2010	1,86	-0,46	4,73	4,85	4,63
Jumlah Penduduk (orang)	84.815	89.640	89.882	90.127	90.373
Pertumbuhan Penduduk (%)	3,64	5,69	0,27	0,27	0,27

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2.1. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	1.625,78	1.787,27	1.937,85	2.111,27	2.295,15
b. LNPRT	27,96	30,21	33,16	34,40	37,38
c. Pemerintah	593,81	665,00	702,77	743,40	805,90
Jumlah	2.247,56	2.482,49	2.673,77	2.889,07	3.138,43
Total PDRB ADHB (Milyar Rp)	3.027,23	3.395,69	3.725,73	4.089,13	4.396,98
Proporsi	74,24	73,11	71,77	70,65	71,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.3.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.360,75	2.483,57	2.608,13	2.742,05	2.876,94
Perubahan (Miliar Rp)	124,47	122,83	124,56	133,92	134,89
PMTB ADHK 2010 (% ADHK)	755,87	788,17	838,28	874,33	905,62
ICOR	6,07	6,42	6,73	6,53	6,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 4.3.1 menunjukkan besaran ICOR padat tahun 2014 sebesar 6,07. pada tahun-tahun berikutnya ICOR berfluktuatif, yaitu masing-masing 6,42 (2015); 6,73 (2016); 6,53 (2017); dan 6,71 (2018).



BAB 5

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014-2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014-2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara

agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap ekonomi luar daerah.

<https://mentawaikab.bps.go.id>



LAMPIRAN

Lampiran 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	1.625,78	1.787,27	1.937,85	2.111,27	2.295,15
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	830,16	904,45	982,39	1.062,92	1.169,55
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	56,61	61,09	65,85	71,81	78,47
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	122,30	132,47	141,09	154,42	167,36
1.d. Kesehatan & Pendidikan	103,21	116,38	131,57	144,86	156,74
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	352,66	394,97	425,88	469,97	500,78
1.f. Hotel & Restoran	63,94	69,96	77,04	83,83	92,53
1.g. Lainnya	96,90	107,94	114,03	123,46	129,71
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	27,96	30,21	33,16	34,40	37,38
3. Konsumsi Pemerintah	593,81	665,00	702,77	743,40	805,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	955,68	1.069,16	1.164,01	1.247,03	1.334,48
4.a. Bangunan	655,87	731,87	806,83	870,33	948,12
4.b. Non-Bangunan	299,81	337,29	357,18	376,71	386,36
5. Perubahan Inventori	(4,08)	0,50	10,75	0,34	(0,03)
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(171,93)	(156,46)	(122,80)	(47,31)	(75,90)
6.a. Ekspor	2.750,91	2.835,47	3.156,63	3.682,66	3.669,87
6.b. Impor	2.922,84	2.991,93	3.279,44	3.729,97	3.745,77
PDRB (1+2+3+4+5+6)	3.027,23	3.395,69	3.725,73	4.089,13	4.396,98

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	1.286,64	1.342,13	1.404,55	1.473,75	1.552,81
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	654,10	681,17	710,76	743,74	785,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	43,34	45,28	47,54	50,43	53,06
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	96,66	101,18	104,93	108,91	113,69
1.d. Kesehatan & Pendidikan	76,92	79,59	84,47	88,93	93,87
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	287,34	300,99	318,17	337,81	356,43
1.f. Hotel & Restoran	46,79	48,63	51,31	54,19	57,37
1.g. Lainnya	81,49	85,28	87,37	89,74	93,13
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22,64	23,42	24,57	25,73	27,33
3. Konsumsi Pemerintah	432,13	473,74	474,33	475,59	498,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	755,87	788,17	838,28	874,33	905,62
4.a. Bangunan	516,09	543,14	585,00	617,98	647,69
4.b. Non-Bangunan	239,78	245,03	253,29	256,34	257,92
5. Perubahan Inventori	(4,08)	(3,87)	0,41	8,20	0,24
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(132,67)	(144,30)	(141,81)	(107,58)	(107,14)
6.a. Ekspor	2.211,74	2.288,30	2.436,74	2.687,15	2.697,47
6.b. Impor	2.344,41	2.432,61	2.578,54	2.794,73	2.804,60
PDRB (1+2+3+4+5+6)	2.360,75	2.483,57	2.608,13	2.742,05	2.876,94

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	53,71	52,63	52,01	51,63	52,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,42	26,64	26,37	25,99	26,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,87	1,80	1,77	1,76	1,78
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,04	3,90	3,79	3,78	3,81
1.d. Kesehatan & Pendidikan	3,41	3,43	3,53	3,54	3,56
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,65	11,63	11,43	11,49	11,39
1.f. Hotel & Restoran	2,11	2,06	2,07	2,05	2,10
1.g. Lainnya	3,20	3,18	3,06	3,02	2,95
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,92	0,89	0,89	0,84	0,85
3. Konsumsi Pemerintah	19,62	19,58	18,86	18,18	18,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	31,57	31,49	31,24	30,50	30,35
4.a. Bangunan	21,67	21,55	21,66	21,28	21,56
4.b. Non-Bangunan	9,90	9,93	9,59	9,21	8,79
5. Perubahan Inventori	(0,13)	0,01	0,29	0,01	(0,00)
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(5,68)	(4,61)	(3,30)	(1,16)	(1,73)
6.a. Ekspor	90,87	83,50	84,73	90,06	83,46
6.b. Impor	96,55	88,11	88,02	91,22	85,19
PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	54,50	54,04	53,85	53,75	53,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,71	27,43	27,25	27,12	27,29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,84	1,82	1,82	1,84	1,84
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,09	4,07	4,02	3,97	3,95
1.d. Kesehatan & Pendidikan	3,26	3,20	3,24	3,24	3,26
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12,17	12,12	12,20	12,32	12,39
1.f. Hotel & Restoran	1,98	1,96	1,97	1,98	1,99
1.g. Lainnya	3,45	3,43	3,35	3,27	3,24
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,92	0,96	0,94	0,94	0,94
3. Konsumsi Pemerintah	19,62	18,30	19,08	18,19	17,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	31,57	32,02	31,74	32,14	31,89
4.a. Bangunan	21,86	21,87	22,43	22,54	22,51
4.b. Non-Bangunan	10,16	9,87	9,71	9,35	8,97
5. Perubahan Inventori	(0,13)	(0,16)	0,02	0,31	0,01
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(5,62)	(5,81)	(5,44)	(3,92)	(3,72)
6.a. Ekspor	93,69	92,14	93,43	98,00	93,76
6.b. Impor	99,31	97,95	98,87	101,92	97,49
PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	9,35	9,93	8,42	8,95	8,71
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,40	8,95	8,62	8,20	10,03
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	10,42	7,92	7,79	9,05	9,28
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,62	8,31	6,51	9,45	8,38
1.d. Kesehatan & Pendidikan	11,96	12,76	13,05	10,11	8,20
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,51	12,00	7,82	10,35	6,56
1.f. Hotel & Restoran	10,74	9,43	10,12	8,81	10,38
1.g. Lainnya	7,96	11,39	5,65	8,27	5,06
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	15,27	8,06	9,75	3,74	8,68
3. Konsumsi Pemerintah	10,69	11,99	5,68	5,78	8,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	14,78	11,87	8,87	7,13	7,01
4.a. Bangunan	12,92	11,59	10,24	7,87	8,94
4.b. Non-Bangunan	19,07	12,50	5,90	5,47	2,56
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(6,99)	(9,00)	(21,51)	(61,48)	60,43
6.a. Ekspor	17,42	3,07	11,33	16,66	-0,35
6.b. Impor	15,63	2,36	9,61	13,74	0,42
PDRB (1+2+3+4+5+6)	13,49	12,17	9,72	9,75	7,53

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,92	4,31	4,65	4,93	5,36
(1.a. s.d 1.g.)					
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,86	4,14	4,34	4,64	5,58
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,95	4,49	4,98	6,09	5,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,11	4,68	3,71	3,79	4,39
1.d. Kesehatan & Pendidikan	3,55	3,47	6,14	5,28	5,56
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,98	4,75	5,71	6,17	5,51
1.f. Hotel & Restoran	6,06	3,94	5,50	5,62	5,87
1.g. Lainnya	2,20	4,65	2,44	2,72	3,78
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	15,27	12,28	3,42	4,92	4,71
3. Konsumsi Pemerintah	10,69	2,69	9,63	0,13	0,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,78	5,92	4,27	6,36	4,30
(4.a. + 4.b.)					
4.a. Bangunan	4,81	5,24	7,71	5,64	4,81
4.b. Non-Bangunan	8,39	2,19	3,37	1,21	0,62
5. Perubahan Inventori	(84,93)	(84,93)	(110,71)	1.878,93	(97,08)
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	1,48	8,77	(1,73)	(24,13)	(0,42)
6.a. Ekspor	9,18	3,46	6,49	10,28	0,38
6.b. Impor	8,71	3,76	6,00	8,38	0,35
PDRB (1+2+3+4+5+6)	5,57	5,20	5,02	5,13	4,92

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 7
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2014 – 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	146,20	160,72	174,27	189,86	206,40
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	137,48	149,79	162,69	176,03	193,69
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	150,01	161,89	174,49	190,29	207,94
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	162,18	175,65	187,09	204,77	221,92
1.d. Kesehatan & Pendidikan	152,21	171,63	194,03	213,64	231,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	151,79	170,00	183,30	202,27	215,54
1.f. Hotel & Restoran	161,23	176,43	194,29	211,40	233,35
1.g. Lainnya	175,44	195,42	206,46	223,53	234,83
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	167,98	181,52	199,21	206,66	224,60
3. Konsumsi Pemerintah	152,81	171,13	180,85	191,31	207,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	170,38	190,61	207,52	222,32	237,91
4.a. Bangunan	169,00	188,58	207,90	224,26	244,31
4.b. Non-Bangunan	173,47	195,15	206,66	217,96	223,54
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	91,90	83,63	65,65	25,29	40,57
6.a. Ekspor	174,61	179,98	200,36	233,75	232,94
6.b. Impor	165,83	169,75	186,07	211,63	212,52
PDRB (1+2+3+4+5+6)	158,83	178,16	195,48	214,55	230,70

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 8
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	115,70	120,69	126,31	132,53	139,64
(1.a. s.d 1.g.)					
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	108,33	112,81	117,71	123,17	130,05
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	114,84	120,00	125,98	133,65	140,59
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	128,17	134,17	139,15	144,42	150,75
1.d. Kesehatan & Pendidikan	113,44	117,37	124,58	131,15	138,44
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	123,67	129,55	136,94	145,39	153,41
1.f. Hotel & Restoran	118,00	122,64	129,39	136,66	144,68
1.g. Lainnya	147,54	154,40	158,17	162,47	168,61
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	136,04	140,69	147,61	154,57	164,21
3. Konsumsi Pemerintah	111,20	121,91	122,07	122,39	128,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,76	140,51	149,45	155,87	161,45
(4.a. + 4.b.)					
4.a. Bangunan	132,98	139,95	150,74	159,24	166,89
4.b. Non-Bangunan	138,73	141,77	146,55	148,32	149,23
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	70,92	77,14	75,80	57,51	57,27
6.a. Ekspor	140,39	145,25	154,67	170,56	171,22
6.b. Impor	133,02	138,02	146,30	158,56	159,13
PDRB (1+2+3+4+5+6)	123,86	130,31	136,84	143,87	150,95

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 9
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Kepulauan
Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	126,36	133,17	137,97	143,26	147,81
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	126,92	132,78	138,22	142,92	148,94
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	130,63	134,91	138,51	142,38	147,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	126,53	130,92	134,45	141,79	147,21
1.d. Kesehatan & Pendidikan	134,17	146,23	155,75	162,90	166,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	122,74	131,22	133,85	139,12	140,50
1.f. Hotel & Restoran	136,64	143,86	150,16	154,69	161,29
1.g. Lainnya	118,91	126,56	130,53	137,58	139,27
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	123,48	129,02	134,96	133,70	136,77
3. Konsumsi Pemerintah	137,42	140,37	148,16	156,31	161,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	126,43	135,65	138,86	142,63	147,36
4.a. Bangunan	127,08	134,75	137,92	140,83	146,38
4.b. Non-Bangunan	125,04	137,65	141,02	146,95	149,80
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	129,59	108,42	86,60	43,98	70,84
6.a. Ekspor	124,38	123,91	129,54	137,05	136,05
6.b. Impor	124,67	122,99	127,18	133,46	133,56
PDRB (1+2+3+4+5+6)	128,23	136,73	142,85	149,13	152,83

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 10
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pengeluaran, 2014 - 2018

KOMPONEN	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d 1.g.)	5,22	5,39	3,61	3,83	3,17
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,44	4,62	4,09	3,40	4,21
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,23	3,27	2,67	2,80	3,88
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,88	3,47	2,70	5,46	3,82
1.d. Kesehatan & Pendidikan	8,12	8,98	6,51	4,59	2,51
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,12	6,92	2,00	3,94	0,99
1.f. Hotel & Restoran	4,42	5,28	4,38	3,02	4,26
1.g. Lainnya	5,64	6,44	3,13	5,40	1,23
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,66	4,49	4,60	(0,93)	2,30
3. Konsumsi Pemerintah	7,80	2,15	5,55	5,50	3,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,37	7,29	2,36	2,72	3,31
4.a. Bangunan	7,74	6,03	2,35	2,11	3,94
4.b. Non-Bangunan	9,85	10,09	2,45	4,21	1,93
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a-6.b)	(8,34)	(16,34)	(20,12)	(49,22)	61,10
6.a. Ekspor	7,55	(0,37)	4,54	5,79	(0,73)
6.b. Impor	6,37	(1,35)	3,41	4,94	0,07
PDRB (1+2+3+4+5+6)	7,50	6,62	4,48	4,39	2,49

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jalan Raya Tuapejat Km. 10, Sipora Utara,
Kepulauan Mentawai 25392 Telp. (759) 320333;

E-mail: bps1301@bps.go.id Homepage: <http://mentawaikab.bps.go.id>

ISBN 978-602-355-083-8



9 786023 550838